

**REFORMASI HUKUM DAN EKOSISTEM TATA KELOLA MINERBA  
ATAS PENCABUTAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)  
DI INDONESIA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PELAKU USAHA**

**DISERTASI**

Oleh

**ANTONIUS SETYADI  
2107190014**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

**REFORMASI HUKUM DAN EKOSISTEM TATA KELOLA MINERBA  
ATAS PENCABUTAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)  
DI INDONESIA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PELAKU USAHA**

**DISERTASI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor  
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**ANTONIUS SETYADI  
2107190014**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antonius Setyadi

NIM : 2107190014

Program Studi : Hukum Program Doktor

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "REFORMASI HUKUM DAN EKOSISTEM TATA KELOLA MINERBA ATAS PENCABUTAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI INDONESIA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PELAKU USAHA":

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 30 September 2024



**Antonius Setyadi**  
NIM: 2107190014



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**PERSETUJUAN TIM PROMOTOR**

**REFORMASI HUKUM DAN EKOSISTEM TATA KELOLA MINERBA  
ATAS PENCABUTAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI  
INDONESIA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PELAKU USAHA**

Oleh:

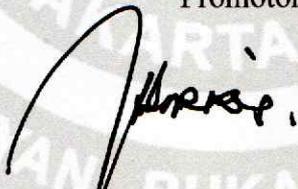
Nama : Antonius Setyadi  
NIM : 2107190014  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi / Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 30 September 2024

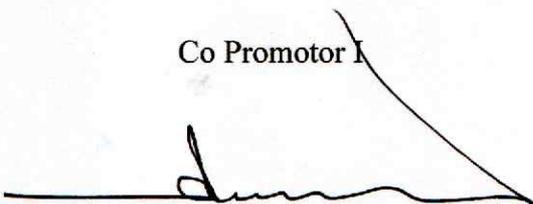
Menyetujui,

Promotor

  
**Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.**

NIP/NIDK: 191690/99904673325

Co Promotor I



**Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.**

NIP/NIDN: 091692/0326106005

Co Promotor II



**Dr. Aartje Tehupeiry, S.H., M.H.**

NIP/NIDN: 981456/0314086404



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI**

Pada tanggal 30 September 2024 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Antonius Setyadi  
NIM : 2107190014  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi / Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "REFORMASI HUKUM DAN EKOSISTEM TATA KELOLA MINERBA ATAS PENCABUTAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI INDONESIA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PELAKU USAHA" oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua	1.
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2.
3	Dr. Aartje Tehupeior, S.H., M.H.	Penguji	3.
4	Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.	Penguji	4.
5	Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.	Penguji	5.
6	Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc.	Penguji	6.
7	Dr. Ir. Raden Sukhyar	Penguji	7.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**REFORMASI HUKUM DAN EKOSISTEM TATA KELOLA MINERBA ATAS  
PENCABUTAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI INDONESIA SERTA  
DAMPAKNYA TERHADAP PELAKU USAHA**

Nama : Antonius Setyadi  
NIM : 2107190014  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi / Bisnis

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 30 September 2024

Mengesahkan,  
Universitas Kristen Indonesia

Direktur



**Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.**  
NIP/NIDN: 001473/0320116402



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Antonius Setyadi  
NIM : 2107190014  
Program Studi : Hukum Program Doktor  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Jenis Tugas Akhir : Disertasi  
Judul : REFORMASI HUKUM DAN EKOSISTEM TATA KELOLA MINERBA ATAS PENCABUTAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI INDONESIA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PELAKU USAHA

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 30 September 2024



**Antonius Setyadi**  
NIM: 2107190014



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**SK PENGANGKATAN DEWAN PENGUJI**  
**UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**



**Universitas Kristen Indonesia**  
**Program Pascasarjana**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Nomor : 0969/UKI.PPS/HKP.03.01/2024

**tentang:**

**DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA**  
**SEMESTER GASAL TA 2024/2025**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**  
**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
  - b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
  - c. bahwa untuk pengujian Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
  4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKLR/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GASAL TA 2024/2025 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 September 2024

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Kristen Indonesia



**Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.**  
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor: 0969/UKI.PPS/HKP.03.01/2024  
Tanggal : 13 September 2024



**SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
SEMESTER GASAL TA 2024/2025**

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji
4.	Senin, 30 September 2024	09.00 - 11.00 WIB	Antonius Setyadi NIM. 2107190014	REFORMASI HUKUM DAN EKOSISTEM TATA KELOLA MINERBA ATAS PENCABUTAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI INDONESIA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PELAKU USAHA	1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. 2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S. 3. Dr. Aartje Tehupetory, S.H., M.H. 4. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. 5. Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc. 6. Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. 7. Dr. Ir. Raden Sukhyar

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Kristen Indonesia



**Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A.**  
NIP./NIDN. : 001473/0320116402



**Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.**  
NIP./NIDK.: 191690/9990463325

**Catatan:**

- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
- Dresscode:  
Penguji : Baju Toga lengkap  
Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdas

## KATA PENGANTAR

Dengan mempersembahkan pujian dan rasa syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, atas berkat dan perlindungan-Nya penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “Reformasi Hukum Dan Ekosistem Tata Kelola Minerba Atas Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Di Indonesia Serta Dampaknya Terhadap Pelaku Usaha”. Dalam penyusunan disertasi ini banyak hambatan dan tantangan yang penulis dapatkan, namun atas bantuan dan bimbingan serta motivasi yang tiada henti, disertai harapan yang optimis dan tekak yang kuat sehingga penulis dapat mengatasi semua itu.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang dalam saya sampaikan untuk kedua orang tua saya, AYAHANDA ALMARHUM ANTONO, IBUNDA DEWI ASIH, ISTRI P INGE dan anak-anak saya DION, TALITA, TANIA serta Menantu YODHA tercinta yang selalu menjadi inspirasi dalam kehidupan saya sehari-hari. Selanjutnya Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang dalam kepada Bapak Prof. Dr. John Pieris, SH., MH., MS selaku Promotor, dan Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia dan juga Ko-Promotor I; serta Ibu Dr. Aartje Tehupeior, SH., MH, selaku Ko- Promotor II yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, nasehat dan motifasi yang sangat berharga kepada penulis sehingga bantuan-demi bantuan mereka yang pada akhirnya penulisan disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Demikian juga penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf akademik Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. Bapak Ketua Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA, selaku Direktur Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Desi Sianipar, M.Th., D.Th, selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

5. Bapak Prof. Dr. John Pieris, SH., MH., MS, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Kristen Indonesia.
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, harapan kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun serta memperbaiki demi kesempurnaan disertasi ini untuk menjadi bacaan yang baik dan bermanfaat. Amin.

Jakarta, 21 September 2024

Penulis;

ANTONIUS SETYADI 2107190014



## DAFTAR ISI

Lembar Sampul .....	i
Lembar Pernyataan Keaslian .....	ii
Lembar Persetujuan .....	iii
Lembaran Pesetujuan Penguji.....	iv
Lembar Pengesahan.....	v
Pernyataan Orisinalitas.....	vi
Lembar SK Dewan Penguji .....	vii
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi .....	xii
Abstrak.....	xvi
<i>Abstract</i> .....	xvii
<b>BAB I</b> <b>Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
1. Kerangka Teoritis .....	9
a. Teori Penegakan Hukum .....	9
b. Teori Kepastian Hukum .....	15
2. Kerangka Konsep .....	18
a. Reformasi Hukum .....	19
b. Ekosistem Tata Kelola Minerba .....	19
c. Pencabutan Izin Usaha Tambang .....	20
d. Pelaku Usaha .....	24
E. Metode Penelitian .....	24
1. Spesifikasi Penelitian .....	24
2. Jenis Dan Sumber Data .....	25

3. Teknik Pengumpulan Data .....	25
4. Teknik Analisis Data .....	26
5. Lokasi Penelitian .....	27
6. Orisinalitas Penelitian .....	27
F. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II</b> Aturan Hukum Dan Ekosistem Tata Kelola Minerba Perlu Reformasi .....	
A. Kebijakan tentang Tata Kelola Minerba .....	
1. Era Kolonial .....	31
a. Era VOC .....	31
b. Era Pemerintahan Hindia Belanda .....	31
2. Era Orde Lama .....	32
3. Era Orde Baru .....	34
4. Era Reformasi .....	35
B. Implementasi dari aturan hukum dan ekosistem Minerba yang memberikan perlindungan hukum .....	36
1. Era Orde Lama .....	36
2. Era Orde Baru .....	41
3. Era Reformasi .....	42
C. Pertambangan .....	45
C.1. Pengertian Pertambangan .....	48
C.1.1 Pengertian Hukum Pertambangan .....	50
C.1.2 Sifat Publik Dari Hukum Pertambangan (Tinjauan Sejarah) .....	51
C.1.3 Kedudukan Hukum Pertambangan Dalam Hukum Positif..	53
C.2. Jenis-Jenis Pertambangan .....	55
C.3. Syarat Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan .....	57
C.4. Pengelolaan Pertambangan Nikel .....	63
C.5. Penegakan Dan Sangsi Terhadap Pemilik Izin Usaha Pertambangan Dalam Perspektif Hukum .....	67
C.5.1. Penegakan Hukum terhadap Aktivitas usaha Pertambangan Menurut UU Nomor 3 Tahun 2020	

	tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .....	73
	C.5.2. Sangsi Hukum Pemilik Izin Usaha Pertambangan .....	84
D	Rangkuman dan Analisis .....	114
BAB III	Badan Koordinasi Penanaman Modal (Bkpm) Diberi Hak Pencabutan Iup Melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Yang Berdampak Pada Kegiatan Pelaku Bisnis Tambang .....	119
A	Peraturan No. 1 Tahun 2022 .....	120
	A.1 Dasar Berlakunya Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2022 .....	120
	A.2 Aspek Filosofis dari Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2022 ..	126
	A.3 Aspek Sosiologi dari Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2022 .....	128
B	Hal-hal yang menyebabkan Pencabutan IUP Tambang Nikel .....	130
	B.4 RKAB yang tidak selesai .....	131
	B.5 Tidak Membayar Pajak .....	135
C	Dampaknya pada pelaku bisnis tambang .....	137
	1. Kepastian Hukum Terhadap Investor .....	141
	2. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di Sektor Industri Pengolahan Mineral Nikel dan Batu-bara .....	166
	2.1 Kepastian Hukum Terhadap Investor .....	172
	2.2 Perkembangan Investasi dan Pengaturan Hukum di Sektor Industri Pertambangan Mineral Nikel dan Batubara Di Indonesia .....	198
D	Rangkuman Dan Analisis .....	203
BAB IV	Mewujudkan Reformasi Hukum Dan Tata Kelola Minerba .....	211
A	Hal-hal yang menyebabkan Reformasi Hukum .....	211
B	Tahapan-tahapan Reformasi Hukum .....	217
C	Dampak dari Reformasi hukum Minerba .....	220
D	Penegakan Hukum Tata Kelola Minerba .....	233
E	Analisis .....	243

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	247
	B. Saran .....	247
Daftar Pustaka .....		249



## ABSTRAK

Reformasi Hukum Dan Ekosistem Tata Kelola Minerba Atas Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Di Indonesia Serta Dampaknya Terhadap Pelaku Usaha. Serta Dampaknya Terhadap Pelaku Usaha. Sehingga Dalam perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Reformasi hukum atau reformasi hukum adalah proses mengkaji undang-undang yang ada, dan menganjurkan serta menerapkan perubahan dalam sistem hukum, biasanya dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan atau efisiensi.

Kata Kunci: **Reformasi Hukum, Tata Kelola Minerba, Pencabutan IUP, Pertambangan.**



## **ABSTRACT**

*Dissertation Title: Legal Reform And Minerba's Governance Ecosystem On Its Permit (IUP) Revocation And Its Impact On Businesses. So that in the improvement in the legal field in an effort to organize quality regulations that are clean and accountable in Ministries/Institutions and Regional Governments. Legal reform or legal reform is the process of reviewing existing laws, and advocating and implementing changes in the legal system, usually with the aim of increasing justice or efficiency.*

**Keywords: Legal Reform, Mineral and Coal Management, IUP Revocation, Mining**

